



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : DEWAN DIREKSI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RUDY HENDRA PRASTOWO
2. Jabatan : DIREKTUR ENERGY PRIMER
3. NHK : 218107

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.601.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/96 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.106.000.000
2. Bangunan Seluas 37 m2 di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Bangunan Seluas 45 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
4. Bangunan Seluas 57 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , WARISAN Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/75 m2 di GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 614.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
5. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



6. MOBIL, HONDA CRV JEEP Tahun 2016, LAINNYA Rp.  
325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 535.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.072.504.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 16.822.504.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 16.822.504.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.